

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu program strategis Pemerintah Aceh dalam rangka pembangunan gampong melalui percepatan penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan sangat tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus pemerintahan gampongnya, sehingga bisa mandiri.

Pada dasarnya kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam program pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah, karena keberhasilan program pembangunan ini tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi tingkat keberhasilannya, begitupun sebaliknya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program pembangunan bagi masyarakat seperti BUMG sebagai salah satu badan yang bertujuan untuk menggerakkan percepatan pembangunan gampong. Salah satu wujud kemauan itu dapat diaplikasikan melalui sikap mendukung terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah.

Seiring diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Konsep

otonomi desa yang tertuang didalamnya memberikan kedudukan yang kuat bagi desa dan masyarakatnya untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya, dimana proses pembangunan secara bertahap telah bergeser mengarah kepada proses yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara keseluruhan (*participatory development*), sejak dari (a) prakarsa (dari masyarakat), (b) perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya (oleh masyarakat), hingga kealokasian manfaatnya (untuk masyarakat).

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah/desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau desa yang bersangkutan. (Nasution, 2009:42).

Kondisi semacam ini didukung oleh pernyataan Suwignyo (1985) bahwa hakikat pengertian pembangunan adalah dari, untuk dan oleh masyarakat”, dengan demikian maka pembangunan di pedesaan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan bukan sebagai obyek pembangunan. Atau dengan kata lain bahwa pembangunan desa harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*) dan koordinasi antar sektor serta kelembagaan yang ada di desa. Melalui proses semacam ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dapat disalurkan dan diwujudkan dalam program pembangunan desa. (Subari, 1992:63).

Dalam Pelaksanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan prakarsa masyarakat setempat, masyarakat yang berpartisipasi pada setiap program pembangunan desa tentu akan

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Partisipasi tersebut juga dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan berorientasi ke masa depan.

Keikutsertaan masyarakat dalam setiap pembangunan desa juga tidak serta merta dapat berjalan sesuai harapan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi dilema dalam pembangunan desa. Salah satu dilema yang seringkali timbul dalam pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kurangnya kemampuan dan pengetahuan sumberdaya manusia. Khususnya gampong Blang Dalam Baroh Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu gampong yang telah menerima berbagai program pemerintah sebagai penunjang pembangunan gampong. Seperti program PNPM pedesaan, BKPG dan beberapa program lainnya yang pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat, namun tidak mendapatkan partisipasi maksimal. Kenyataannya, ada pembangunan infrastruktur yang dibangun tetapi tidak mendapatkan perawatan yang baik dari masyarakat.

Sementara BUMG yang merupakan salah satu badan usaha yang memiliki potensi sebagai penunjang pembangunan gampong juga mendapat perhatian yang minim dari masyarakat setempat. Padahal Badan Usaha Milik Desa (BUMG) adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong. Namun kehadiran BUMG di gampong tersebut bagi masyarakat setempat dipandang sebagai sebuah hal yang biasa dan tidak memberi pengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat gampong Blang Dalam Baroh tidak paham terkait manfaat dan pengelolaan BUMG.

Menurut Geuchik Gampong Blang Dalam Baroh, aset BUMG gampong Blang Dalam Baroh seperti traktor, moller, doorsmeer dan tratak jika dikelola dengan baik maka akan memiliki hasil yang dapat menunjang pembangunan gampong. Sementara target hasil yang ingin dicapai dari BUMG gampong Blang Dalam Baroh tidak tercapai sesuai harapan. Sejak

tahun 2013 BUMG memiliki target dari hasil traktor, moller, doorsmeer dan tratak adalah sekitar Rp. 75.000.000 pertahun, begitu juga pada tahun 2014 pemerintah gampong menaruh harapan terhadap pengelolaan BUMG agar dapat memberi keuntungan sebesar Rp. 95.000.000 pertahun. Namun hasil yang diharapkan tidak tercapai, pada tahun 2015 pemerintah gampong hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000.000. Berikut rincian target pencapaian dalam bentuk tabel.

Tabel 1

Nama Barang	Target			Pencapaian		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Traktor	40.000.000	45.000.000	45.000.000	19.500.000	20.000.000	18.200.000
Moller	20.000.000	20.000.000	20.000.000	8.500.000	10.500.000	7.000.000
Doorsmeer	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.500.000	3.200.000	2.800.000
Tratak	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.400.000	2.000.000
Jumlah	75.000.000	80.000.000	80.000.000	33.500.000	36.100.000	30.000.000

Sumber: Geuchik Gampong Blang Dalam Baroh

Target keuntungan yang ingin dicapai dalam pengelolaan BUMG gampong Blang Dalam Baroh sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak terealisasi dengan baik. Bahkan beberapa asset yang dimiliki oleh BUMG sudah tidak terawat dan tidak memiliki biaya perawatan. Permasalahan ini juga tidak mendapat respon yang signifikan dari masyarakat terhadap pengelola BUMG. Padahal secara pengelolaan para pengurus BUMG sudah tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari segi capaian target yang tidak memiliki keuntungan sama sekali dan lemahnya partisipasi masyarakat. Padahal para pengelola BUMG tersebut adalah masyarakat gampong setempat yang dipilih melalui rapat umum gampong di SK-kan oleh Geuchik Gampong Blang Dalam Baroh. Kepada mereka diberi amanah untuk mengelola BUMG sebagai upaya mendongkrak pembangunan gampong Blang Dalam Baroh. Namun selama 3 tahun terakhir masyarakat Gampong Blang Dalam Baroh dapat merasakan bahwa BUMG tidak berjalan maksimal serta tidak produktif mendongkrak laju pembangunan Gampong.

Menurut Tuha Peut Gampong Blang Dalam Baroh, kurangnya partisipasi masyarakat telah berdampak pada lambatnya pembangunan gampong tersebut. Kenyataan itu tentu saja membuat masyarakat tidak dapat terlibat untuk memberikan pendapatnya untuk menentukan arah pembangunan desa. Atau dengan kata lain, bukti ini menunjukkan masyarakat dalam kondisi tidak berdaya untuk mengakses pada program-program pembangunan, khususnya pada keputusan-keputusan yang secara nyata dapat mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga permasalahan sosial seperti kemiskinan masih terus membelit kehidupan mereka.

BUMG merupakan salah satu program strategis untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan gampong. Untuk mencapai keberhasilan program ini sangat diperlukan partisipasi seluruh komponen masyarakat digampong Blang Dalam Baroh.

Dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul ***Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gampong (Studi BUMG Gampong Blang Dalam Baroh Kecamatan Nisam)***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta fenomena diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong Blang Dalam Baroh melalui program BUMG ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat gampong Blang Dalam Baroh terhadap program BUMG ?

## **1.3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kajian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong Blang Dalam Baroh melalui pengelolaan program BUMG.
2. Kajian ini mengkaji hambatan partisipasi masyarakat gampong Blang Dalam Baroh melalui pengelolaan program BUMG.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong Blang Dalam Baroh melalui program BUMG.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat gampong Blang Dalam Baroh terhadap program BUMG.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran Sebagai pengembangan khazanah kajian dibidang administrasi publik dalam mengembangkan teoritis yang lebih luas dan mendalam khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara empiris hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan pembangunan gampong yang partisipatif, melalui perbaikan atau penyempurnaan langkah-langkah kegiatan pembangunan yang baik dan mendasarkan pada kebutuhan atau aspirasi masyarakat.